

## **PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**Dessy Kristanti Pangaribuan<sup>1</sup>, Tri Widyastuti<sup>2</sup>, Zulkifli<sup>3</sup>, Risma Adelina Simanjuntak<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pancasila

<sup>4</sup>Program Studi Teknologi Industri, Universitas AKPRIND Indonesia

Email: <sup>1</sup>dessypangaribuan17@gmail.com, <sup>2</sup>triewidhiastuti@yahoo.com,

<sup>3</sup>zulkifli240671@gmail.com, <sup>4</sup>risma@akprind.ac.id

Masuk: 28 Februari 2024, Revisi masuk: 22 Maret 2024, Diterima: 28 Maret 2024

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to test and analyze the influence of the government's internal control system, agency level financial application system, human resource competency on the quality of financial reports with good government governance as an intervening variable. This research uses a quantitative approach with a questionnaire survey given to all financial managers at the Directorate General of Economic Development and Investment in Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration. The questionnaire that could be processed was 68 respondents. Data analysis uses PLS structural equation modeling. This research shows that the government's internal control system, agency level financial application system and human resource competency influence good government governance. The government's internal control system, agency level financial application system and human resource competency influence the quality of financial reports and good government governance also influences the quality of financial reports. From the results of this research, human resource competency has the greatest influence on good government governance. Competent human resources are very necessary so that financial management can be accounted for in a timely, transparent and accountable manner. It is hoped that the implications of this research can provide evaluation material for policy makers to create policies to improve the quality of financial reports.*

**Keywords:** *good government governance, government internal control system, human resource competency, quality of financial reports*

### **INTISARI**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan *good government governance* sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei kuesioner yang diberikan kepada seluruh pengelola keuangan di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 68 responden. Analisis data menggunakan *structural equation modelling* PLS. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*. Sistem pengendalian intern pemerintah, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta *good government governance* juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang paling besar terhadap *good government governance*. Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan – kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

**Kata-kata kunci:** kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, sistem pengendalian intern pemerintah, tata kelola pemerintahan.

## PENDAHULUAN

Prinsip utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan sesuai aturan hukum (Sedarmayanti, 2012). Laporan keuangan yang berkualitas tentunya merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat. Laporan keuangan pemerintahan setiap tahunnya diperiksa dan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintahan disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004. Pada Tahun 2022, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tidak menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan bebas dari penyimpangan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah selama 8 tahun terakhir ternyata pada tahun 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pernah mendapat opini WDP yang artinya opini audit yang diterbitkan sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Menurut BPK RI, kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor yang menyebabkan pengecualian opini laporan keuangan pemerintah. Masih ditemukannya penyimpangan dalam

pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah belum memenuhi empat karakteristik kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, instansi pemerintah memerlukan sistem pengendalian intern pemerintah. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika sistem pengendalian intern pemerintah lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak relevan. Dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik diharapkan tidak ada lagi temuan terkait perjalanan dinas, seperti temuan perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai ketentuan Standar Biaya Masukan TA 2022, kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas transportasi lokal dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sewa kendaraan. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel. Penelitian yang dilakukan oleh Mahartini, Yuesti dan Sudiartana (2021), Riska, Zamzami dan Gowon (2020), Maulina dan Fatmi (2019), Anggiani (2022), Widyawati dan Ismunawan (2022), dan Ismail, Marselina dan Loda (2019), menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Slamet (2011), salah satu faktor yang dapat mewujudkan *good government governance* dalam pengelolaan keuangan ialah adanya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Teknologi informasi menjadi salah satu pendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Diamond dan Khemani (Amriani & Iskandar, 2019), pemerintahan yang baik berkewajiban menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya, tepat waktu dan relevan. Laporan keuangan harus

berkualitas, dimana laporan tersebut sesuai dengan data atau dokumen yang tercatat di Kementerian Keuangan. Sistem aplikasi keuangan tersebut dikenal dengan nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Pengembangan sistem dari berbagai jenis sistem menjadi satu sistem yaitu Aplikasi SAKTI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan keuangan negara sehingga lebih efektif, efisiensi sumber daya, konsolidasi lebih cepat, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan laporan keuangan lebih berkualitas. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN dengan menggabungkan berbagai aplikasi yang telah ada sebelumnya menjadi satu sistem yang terintegrasi.

Dengan penggunaan aplikasi SAKTI ini, diharapkan untuk setiap Kementerian/Lembaga dapat menyajikan informasi keuangan yang tertera dalam laporan keuangan secara transparan. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi terkait sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yaitu ketika sudah tutup buku laporan periode bulanan, triwulan atau semester, apabila ada koreksi yang akan dilakukan maka satker harus melapor ke DJPb untuk membuka aplikasinya, namun waktu penyelesaian dari DJPb tidak dapat ditentukan sehingga pembuatan laporan keuangan menjadi terhambat. Hasil penelitian Mahartini, Yuesti dan Sudiartana (2021), Riska, Zamzami dan Gowon (2020), Slamet dan Irmadiani (2022), Wati, dkk (2014), dan Irafah, Sari dan Muhyarsyah (2020) menunjukkan bahwa sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain menggunakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan orang - orang yang berkompoten. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Namun sudah menjadi permasalahan umum di pemerintahan bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika

akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Semakin tinggi tingkat kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin baik.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan hasil beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten sehingga peneliti menilai perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan *good government governance* sebagai variabel intervening.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang baik adalah penelitian yang dilakukan secara efektif dan efisien maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena penelitian ini menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis.

## Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berlokasi di Jl. TMP. Kalibata No. 17 RT/RW 06/07 Jakarta Selatan.

## Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para pengelola keuangan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebanyak 68 orang.

Menurut Arikunto (2010) bilamana subjeknya kurang dari 100 sampel maka sebaiknya diambil semuanya, namun jika subjeknya besar atau lebih dari 100 sampel maka dapat diambil dengan rasio 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih. Pada penelitian ini mengingat populasi adalah sebanyak 68 orang, maka data diharapkan bisa

didapatkan sesuai dengan jumlah populasi yang ada. Sampel pada penelitian ini adalah para pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), staf kuasa pengguna anggaran, staf pejabat pembuat komitmen, staf bendahara, dan staf pejabat penandatanganan surat perintah membayar.

### Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *self-administrative survey* dengan alat bantu kuesioner. Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan secara online kepada seluruh responden dengan perangkat *Google Forms* melalui tautan yang dikirimkan melalui *whatsapp* masing - masing responden. Sebelum digunakan dalam penelitian, pertanyaan - pertanyaan pada kuesioner terlebih dahulu diuji coba untuk mengetahui keterbacaan dan keterpahaman instrumen serta validitas dan reliabilitas instrumen melalui *pretest*.

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan tujuan untuk dapat menghasilkan data yang akurat.

### Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel independen dan variabel dependen.

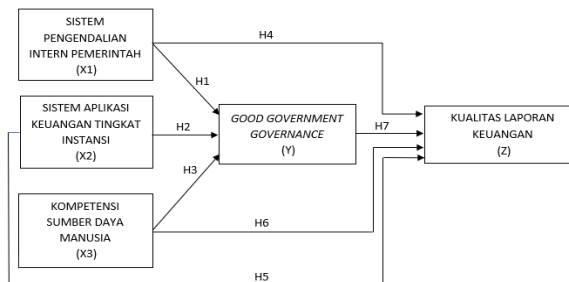
Variabel – variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Variabel independen yaitu sistem pengendalian intern pemerintah
- Variabel independen yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi
- Variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia
- Variabel intervening yaitu *good government governance*
- Variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan

### Kerangka Penelitian

Penelitian ini didukung oleh grand theory yaitu teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menggambarkan bahwa para pemimpin tidak termotivasi oleh tujuan – tujuan

individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi. *Stewardship theory* menggambarkan hubungan yang kuat antara keputusan dan kesuksesan organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan perwujudan pelaksanaan *good government governance*.



Gambar 1 Kerangka Penelitian

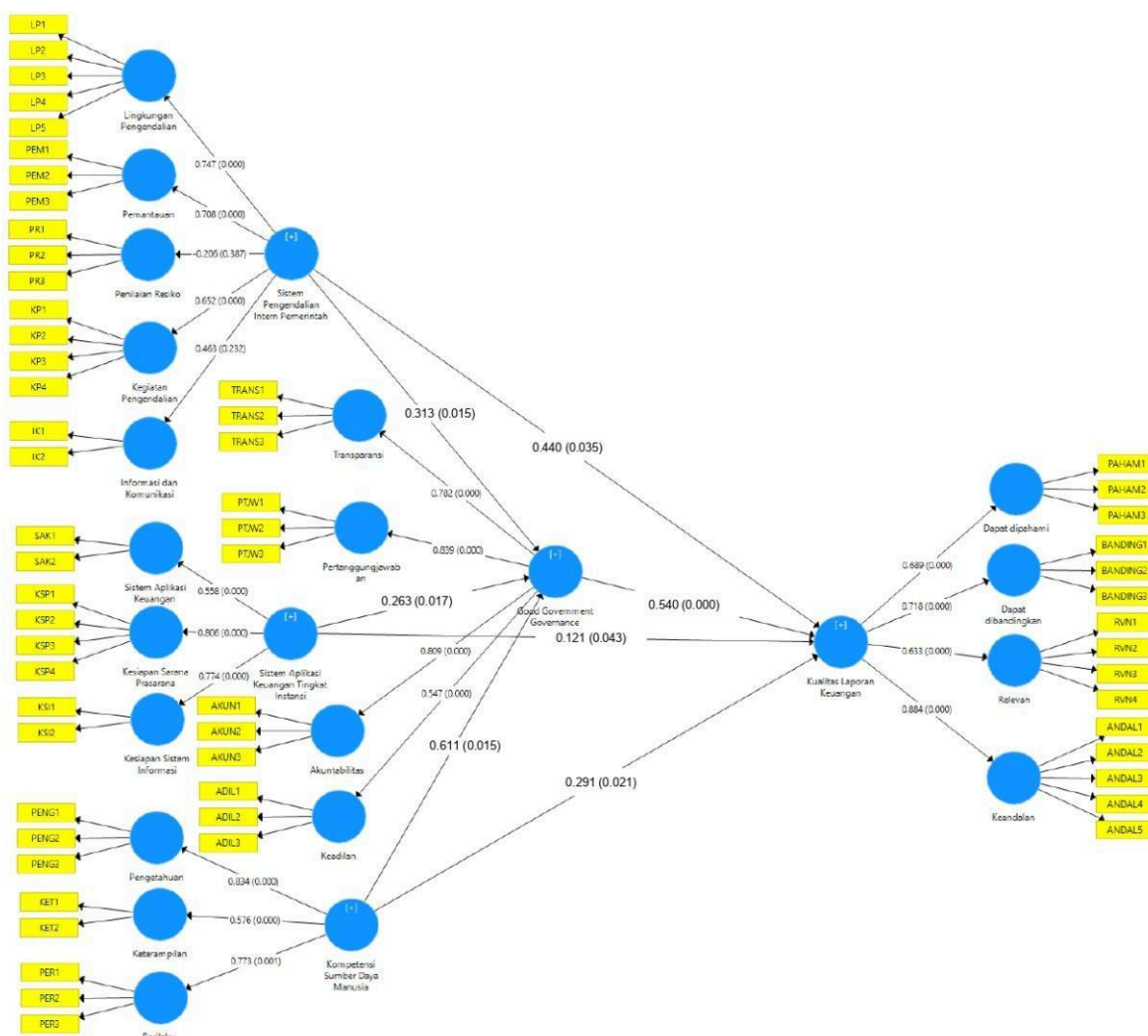
Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan dugaan secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Pengujian hipotesis dan konfirmasi hubungan dugaan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang dihadapi (Sekaran & Bougie, 2016). Berdasarkan kerangka pemikiran dan merujuk pada penelitian – penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, maka disusun beberapa hipotesis terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap *good government governance*
- H2 : Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap *good government governance*
- H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*
- H4 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H5 : Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H6 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- H7 : *Good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

*estimates* (O) untuk mengetahui arah hubungan antar variabel, t-statistics (T) untuk pengujian parsial, dan p-values (P) untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hubungan tersebut. Nilai *original sample* yang mendekati +1 mengindikasikan hubungan yang positif, sedangkan nilai yang mendekati -1 mengindikasikan hubungan yang negatif (Sarstedt, Hair, Hult, & Ringle, 2017). Untuk nilai t-statistics lebih dari 1,96 atau p-value yang lebih kecil dari taraf signifikansi. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada tabel dan untuk hasil model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**HASIL & PEMBAHASAN  
HASIL PENGUJIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (*Partial Least Square*). Nilai - nilai tersebut dapat dilihat dari hasil *bootstrapping*. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai *original sample*



Gambar 2 Hasil Pengujian  
Sumber : Output SmartPLS (2024)

Tabel 1 Hasil Uji Penelitian

|   | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics | P Values |
|---|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|----------|
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -> Good Government Governance     | 0.313               | 0.592           | 0.115                      | 2.861        | 0.015    |
| Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi -> Good Government Governance | 0.263               | 0.673           | 0.103                      | 2.157        | 0.017    |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia -> Good Government Governance            | 0.611               | 0.839           | 0.043                      | 2.546        | 0.015    |
| Sistem Pengendalian Intern Pemerintah -> Kualitas Laporan Keuangan      | 0.440               | 0.717           | 0.126                      | 2.172        | 0.035    |
| Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi -> Kualitas Laporan Keuangan  | 0.121               | 0.754           | 0.102                      | 2.597        | 0.043    |
| Kompetensi Sumber Daya Manusia -> Kualitas Laporan Keuangan             | 0.291               | 0.786           | 0.066                      | 2.764        | 0.021    |
| Good Government Governance -> Kualitas Laporan Keuangan                 | 0.540               | 0.530           | 0.140                      | 3.856        | 0.000    |

Berdasarkan hasil analisis pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa :

1. H1: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 1 diterima karena memiliki nilai p value 0,015 atau <0,05 dan nilai t statistic 2,861 atau > 1,96 sehingga peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah

- akan meningkatkan *good government governance* sebesar 0,313 atau 31,3%
2. H2: Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 2 diterima karena memiliki nilai p value 0,017 atau < 0,05 dan nilai t statistic 2,157 atau > 1,96 sehingga peningkatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi akan meningkatkan *good government governance* sebesar 0,263 atau 26,3%
3. H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 3 diterima karena memiliki nilai p value 0,015 atau < 0,05 dan nilai t statistic 2,548 atau > 1,96 sehingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan *good government governance* sebesar 0,611 atau 61,1%
4. H4: Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 4 diterima karena memiliki nilai p value 0,043 atau < 0,05 dan nilai t statistic 2,597 atau > 1,96 sehingga peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,121 atau 12,1%
5. H5: Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 5 diterima karena memiliki nilai p value 0,035 atau < 0,05 dan nilai t statistic 2,172 atau > 1,96 sehingga peningkatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,440 atau 44,0%
6. H6: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 6 diterima karena memiliki nilai p value 0,021 atau < 0,05 dan nilai t statistic 2,764 atau > 1,96 sehingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,291 atau 29,1%
7. H7: *Good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 7 diterima karena memiliki nilai p value 0,000 atau < 0,05 dan nilai t statistic 3,856 atau > 1,96 sehingga peningkatan *good government governance* akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,540 atau 54,0%

## **PEMBAHASAN HASIL PENGUJIAN**

### **Sistem pengendalian intern pemerintah dan *good government governance***

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 1 penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yusniar, Darwanis, dan Abdullah (2016) dan Dary (2020) yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari peran sistem pengendalian intern pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sangat berguna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sistem pengendalian intern pemerintah diharapkan dapat mengendalikan penyelenggaraan kegiatan, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

### **Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan *good government governance***

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 2 penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yusniar, Darwanis, dan Abdullah (2016) dan Dary (2020) menyatakan bahwa sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap *good government governance*. Informasi yang lebih lengkap ini mendukung pemerintah saat menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

### **Kompetensi sumber daya manusia dan *good government governance***

Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *good government governance*. Hipotesis 3 penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Helmayani (2017) yang menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap implementasi *good government governance*. Teori *stewardship* memandang bahwa pemerintah sebagai pihak yang dapat dipercaya, berintegritas tinggi, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab dan

mampu berperilaku dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Sumber daya manusia diharapkan dapat bekerja dengan optimal untuk kepentingan publik dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat dan dapat membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya. Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

### **Sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 4 penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yusriwati (2022), Yusniar, Darwanis, Abdullah. (2016), Ismail, Marselina & Loda (2019), Widyawati dan Ismunawan (2022), dan Anggiani (2022) yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas agar dapat memberikan manfaat bagi para penggunanya untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang andal terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan hal yang paling penting dalam suatu instansi. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat memperbaiki berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai.

### **Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan kualitas laporan keuangan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 5 penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mahartini, Yuesti dan Sudiartana (2021), Riska, Zamzami dan Gowon (2020), Wati dan Herawati (2014), Irafah, Sari dan

Muhyarsyah (2020) dan Budiono (2018) yang menyatakan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya sistem aplikasi keuangan tingkat instansi akan membantu penyusunan laporan keuangan dan mempersingkat waktu untuk menghasilkan laporan keuangan.

Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang lemah akan menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu pemanfaatan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi wajib bagi setiap aparatur pemerintah supaya laporan keuangan dapat disusun dengan baik dan benar agar laporan keuangan tersebut dapat dijadikan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

#### **Kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 6 penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kadek dkk (2014) dan Putriarsi (2017) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem maka proses penyusunan laporan keuangan akan dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga penyampaian waktu pelaporan keuangan akan tepat waktu.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif. Semakin sumber daya manusianya berkompoten, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik sehingga laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

#### **Good government governance dan kualitas laporan keuangan**

Hasil penelitian membuktikan bahwa *good government governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis 7 penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oktarina, Raharjo & Andini (2016), Azlim, Darwanis, & Usman (2012), Zulaika & Rahmadani (2023), dan Fithri, Ardiani, & Mubarak (2022), menyatakan bahwa terdapat pengaruh *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerapkan prinsip *good government governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan keadilan.

*Good government governance* dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai - nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial karena kualitas laporan keuangan pemerintah saat ini dan kedepan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahannya yang baik.

#### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini bahwa pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, pemantauan, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan informasi serta komunikasi berpengaruh terhadap *good government governance*. Keberhasilan penerapan *good government governance* tidak terlepas dari peran sistem pengendalian intern pemerintah yang mampu menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran dan belanja negara. Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, transparan dan akuntabel. Pengendalian intern pemerintah yang meliputi lingkungan pengendalian, pemantauan, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan informasi serta komunikasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern pemerintah dinilai dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh



organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi sejak dini terjadinya kemungkinan penyimpangan dan meminimalisir terjadinya tindakan yang merugikan negara. Sumber daya manusia yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab, dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan sehingga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, T. N., & Iskandar, A, Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2019, 3(1), 54-74.
- Anggiani. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serang Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 2022.
- Arikunto, S, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azlim, Darwanis, & Usman, A, Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi pemerintahan Terhadap kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh, *Jurnal Akuntansi Universitas Syiah Kuala*, 2012, 1(1), 1-14.
- Budiono, V. S., Muchlis, & Masri, I. 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan, Pengalaman Kerja Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol 13 (2) 2018, 110-128.
- Wulandary, Nadya, Pengaruh Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan Sistem Sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Good Government Governance Pemerintah Kabupaten Langkat, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2020
- Fithri, A., Ardiani, R., & Mubarak, S., Pengaruh Faktor Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan OPD Di Kota Palembang, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 6 (1) 2022, 102-109.
- Helmayani, P. L, 2017, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Badan Permusyawaratan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Good Village Governance (Studi Pada Desa di Kabupaten Buleleng)*, Skripsi Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 8 (2) 2020, 337-348.
- Ismail, Marselina, & Loda, Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten NAGEKEO, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 15(12) 2019, 5889-5896.
- Mahartini, N. K., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern , Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem, *Jurnal Karya Riset Mahasiswa Akuntansi*, Vol 1 (4) 2021, 1125-1134.
- Maulina, L., & Fatmi, F, Dampak Penerapan Standar akuntansi pemerintah (SAP), Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Serta Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Riset dan Akuntansi*, Vol 2 (1) 2019, 48-60.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas

- Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014), *Journal Of Accounting*, Volume 2 (2) Maret 2016.
- Pujanira, P, Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi DIY, *Jurnal Nominal*. Vol VI (2) 2017, 14-28.
- Riska, F., Zamzami, Z., & Gowon, M, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Sistem pengendalian intern pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 6(3) 2021, 136-148.
- Sarstedt, M., Hair, J. F., Hult, G. T., & Ringle, C. M, 2017, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 2nd Edition*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.
- Sedarmayanti, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Refika Aditama Eresco.
- Sekaran, U., & Bougie, R, 2016, *Research Methods For Business, A Skill Building Approach, 7th Edition*. New Jersey: Wiley.
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Bogor), *Jurnal Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*, 2022.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K, Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 2(1) Oktober 2014, 1-15.
- Widyawati, M. J., & Ismunawan, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Surakarta, *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol 1 (6) Mei 2022, 687-698.
- Yusniar, Darwanis, & Abdullah, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Government Governance dan Dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh), *Jurnal Administrasi Akuntansi*, Vol 5 (2) Mei 2016, 100-115.
- Yusriwanti, S, Pengaruh Penerapan Standar akuntansi pemerintah Berbasis Akruai, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kab. Inhil), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 11 (1) 2022, 34-44.
- Zulaika, N., & Rahmadani, P. D. (2023). Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, Dan Good Government Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 2(1) Januari 2023, 163-170.

#### BIODATA PENULIS

- Dessy Kristanti Pangaribuan, S.E, M.M, lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1990, menyelesaikan Pendidikan S1 bidang ilmu Akuntansi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2012, dan S2 bidang ilmu Manajemen dari Universitas Pancasila Tahun 2024. Saat ini tercatat sebagai PNS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE, Ak, MM, CA lahir di Purworejo pada tanggal 23 Maret 1964, menyelesaikan Pendidikan S1 bidang ilmu Akuntansi dari Universitas Diponegoro tahun 1988, S2 bidang ilmu Manajemen Keuangan dari Universitas Pancasila tahun 1998, dan S3 bidang ilmu Akuntansi dari Universitas Padjajaran tahun 2008. Saat ini tercatat sebagai Dosen di Universitas Bhayangkara dengan jabatan akademik Guru Besar pada bidang minat Akuntansi.
- Dr. Ir. Zulkifli, MM, SECM, CRMP lahir di Palembang pada tanggal 24 Juni 1971, menyelesaikan Pendidikan S1 bidang ilmu Teknik dari Universitas Sriwidjaja tahun 1991, S2 bidang ilmu Manajemen

dari Institut Bisnis Indonesia tahun 1998, dan S3 bidang ilmu Sustainable Development Management dari Universitas Trisakti. Saat ini tercatat sebagai Dosen di Universitas Pancasila.

Ir. Risma Adelina Simanjuntak, M.T. lahir di Balige pada tanggal 2 Januari 1961, menyelesaikan Pendidikan S1 bidang ilmu Teknik dan Manajemen Industri dari Universitas Sumatera Utara tahun 1986 dan S2 di bidang ilmu Teknik Mesin-Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun 1998. Saat ini tercatat sebagai Dosen di Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta.